MANORHABI

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM MANOKWARI

Jln. Bhayangkara No. 01 Manokwari - Papua Barat Telp. (0986) 211440 e-mail: rsu.manokwari@gmail.com

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin Oleh BPJS Kesehatan Meliputi:

- 1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
- 3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja
- 4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat Peserta
- 5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
- 6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik
- 7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
- 8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi
- 9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol
- 10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobby yang membahayakan diri sendiri
- 11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
- 12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen
- 13. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik
- 14. Perbekalan kesehatan rumah tangga
- 15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah
- 16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
- 17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial
- 18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan
- 21. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain